

LAPORAN AKHIR
“Pengaruh Pembangunan Infrastruktur PUPR Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat”

RINGKASAN EKSEKUTIF

PENILAIAN ANGGARAN INFRASTRUKTUR PUPR DALAM MENDUKUNG TEMA

1. Penilaian Anggaran Pembangunan Infrastruktur PUPR dalam Mendukung Pariwisata

Pengembangan infrastruktur kepariwisataan merupakan salah satu aspek penting untuk mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia. Dalam program “Nawa Cita”, pariwisata menjadi salah satu program prioritas nasional. Berdasarkan PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, terdapat 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (Tabel 8.1). Kawasan Strategis Pariwisata Nasional adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Tabel 8.1
Daftar Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)
Mendukung Pariwisata

NO.	KSPN	NO.	KSPN
1.	KSPN Kintamani – Danau Batur dan sekitarnya	21.	KSPN Derawan – Sangalaki dan sekitarnya
2.	KSPN Komodo dan sekitarnya	22.	KSPN Bitung – Lembeh dan sekitarnya
3.	KSPN Borobudur dan sekitarnya	23.	KSPN Singkarak dan sekitarnya
4.	KSPN Rinjani dan sekitarnya	24.	KSPN Sentarum dan sekitarnya
5.	KSPN Nongsa – Pulau Abang dan sekitarnya	25.	KSPN Bandaneira dan sekitarnya
6.	KSPN Toba dan sekitarnya	26.	KSPN Weh dan sekitarnya
7.	KSPN Bukittinggi dan sekitarnya	27.	KSPN Kepulauan Seribu dan sekitarnya
8.	KSPN Bromo – Tengger – Semeru dan sekitarnya	28.	KSPN Ujung Kulon – Tj. Lesung dan sekitarnya
9.	KSPN Bunaken dan sekitarnya	29.	KSPN Togean – Tomini dan sekitarnya
10.	KSPN Raja Ampat dan sekitarnya	30.	KSPN Merapi – Merbabu dan sekitarnya
11.	KSPN Pangandaran dan sekitarnya	31.	KSPN Karimunjawa dan sekitarnya
12.	KSPN Toraja dan sekitarnya	32.	KSPN Tambora dan sekitarnya
13.	KSPN Ende – Kelimutu dan sekitarnya	33.	KSPN Tangkahan dan sekitarnya
14.	KSPN Kota Tua – Sunda Kelapa dan sekitarnya	34.	KSPN Palembang Kota dan sekitarnya (Sungai Musi)
15.	KSPN Tanjung Puting dan sekitarnya	35.	KSPN Tanjung Kelayang dan sekitarnya

LAPORAN AKHIR
“Pengaruh Pembangunan Infrastruktur PUPR Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat”

16.	KSPN Teluk Dalam – Nias dan sekitarnya	36.	KSPN Muaro Jambi dan sekitarnya
17.	KSPN Dieng dan sekitarnya	37.	KSPN Kerinci Seblat dan sekitarnya
18.	KSPN Wakatobi dan sekitarnya	38.	KSPN Trowulan dan sekitarnya
19.	KSPN Pantai Selatan Lombok dan sekitarnya	39.	KSPN Way Kambas dan sekitarnya
20.	KSPN Siberut dan sekitarnya	40.	KSPN Prambanan – Kalasan dan sekitarnya
Lanjutan.....			
NO.	KSPN	NO.	KSPN
41.	KSPN Kuta – Sanur – Nusa Dua dan sekitarnya	65.	KSPN Maninjau dan sekitarnya
42.	KSPN Morotai dan sekitarnya	66.	KSPN Nemberala – Rotendao dan sekitarnya
43.	KSPN Sentani dan sekitarnya	67.	KSPN Pantai Selatan Yogya dan sekitarnya
44.	KSPN Sangiran dan sekitarnya	68.	KSPN Karst Gunung Kidul dan sekitarnya
45.	KSPN Takabonerate dan sekitarnya	69.	KSPN Halimun dan sekitarnya
46.	KSPN Rupaat dan sekitarnya	70.	KSPN Ijen – Baluran dan sekitarnya
47.	KSPN Agats – Asmat dan sekitarnya	71.	KSPN Waikabubak – Manupeh Tanah Daru dan sekitarnya
48.	KSPN Pagaralam dan sekitarnya	72.	KSPN Karangasem – Amuk dan sekitarnya
49.	KSPN Krakatau dan sekitarnya	73.	KSPN Lagoi – Bintan dan sekitarnya
50.	KSPN Natuna dan sekitarnya	74.	KSPN Enggano dan sekitarnya
51.	KSPN Alor – Kalabahi dan sekitarnya	75.	KSPN Bandung Kota dan sekitarnya
52.	KSPN Yogyakarta Kota dan sekitarnya	76.	KSPN Puncak – Gede Pangrango dan sekitarnya
53.	KSPN Lhoksado dan sekitarnya	77.	KSPN Teluk Cenderawasih dan sekitarnya
54.	KSPN Karst Pacitan dan sekitarnya	78.	KSPN Menjangan – Pemuteran dan sekitarnya
55.	KSPN Bali Utara/Singaraja dan sekitarnya	79.	KSPN Taman Nasional Bali Barat dan sekitarnya
56.	KSPN Gili Tramena dan sekitarnya	80.	KSPN Tulamben – Amed dan sekitarnya
57.	KSPN Moyo dan sekitarnya	81.	KSPN Bedugul dan sekitarnya
58.	KSPN Kota Bangun – Tanjung Isuy dan sekitarnya	82.	KSPN Nusa Penida dan sekitarnya
59.	KSPN Kayan Mentarang dan sekitarnya	83.	KSPN Ubud dan sekitarnya
60.	KSPN Ciwidey dan sekitarnya	84.	KSPN Besakih – Gunung Agung dan sekitarnya
61.	KSPN Tomohon – Tondano dan sekitarnya	85.	KSPN Long Bagun dan sekitarnya
62.	KSPN Danau Ranau dan sekitarnya	86.	KSPN Sambas dan sekitarnya
63.	KSPN Biak dan sekitarnya	87.	KSPN Gorontalo Kota – Limboto dan sekitarnya
64.	KSPN Tangkuban Perahu dan sekitarnya	88.	KSPN Wazur – Merauke dan sekitarnya

Sumber : PP No. 50 Tahun 2011 – Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025

Dari 88 KSPN tersebut, Kementerian Pariwisata dalam Rencana Strategis Kementerian Pariwisata 2015-2019 memprioritaskan pengembangan kawasan pariwisata

LAPORAN AKHIR

“Pengaruh Pembangunan Infrastruktur PUPR Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat”

pada 25 KSPN. Dari 25 KSPN prioritas tersebut, Kementerian Perekonomian Bidang Maritim dan Sumber Daya memfokuskan pengembangan pada 10 KSPN Prioritas, yaitu:

1. KSPN Toba dan sekitarnya (Provinsi Sumatera Utara);
2. KSPN Tanjung Kelayang dan sekitarnya (Provinsi Kepulauan Bangka Belitung);
3. KSPN Ujung Kulon – Tanjung Lesung dan sekitarnya (Provinsi Banten);
4. KSPN Pulau Seribu dan sekitarnya (DKI Jakarta);
5. KSPN Borobudur dan sekitarnya (Provinsi Jawa Tengah);
6. KSPN Bromo – Tengger – Semeru dan sekitarnya (Provinsi Jawa Timur);
7. KSPN Mandalika (Provinsi Nusa Tenggara Barat);
8. KSPN Labuhan Bajo dan sekitarnya dan KSPN Komodo dan sekitarnya (Provinsi Nusa Tenggara Timur);
9. KSPN Wakatobi dan sekitarnya (Provinsi Sulawesi Tenggara); dan
10. KSPN Morotai dan sekitarnya (Provinsi Maluku Utara)

Kemudian berdasarkan Surat Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Nomor S-54/Menko/Maritim/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 telah ditetapkan 5 KSPN Prioritas sampai akhirnya menjadi 3 KSPN Prioritas sampai dengan tahun 2019. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah saat ini sedang menyusun Masterplan Pengembangan KSPN Danau Toba dan sekitarnya, KSPN Borobudur dan sekitarnya, dan KSPN Mandalika melalui pinjaman dana dari Bank Dunia.

Sesuai dengan Program “Nawa Cita”, sektor kepariwisataan tumbuh menjadi sektor unggulan dengan pertumbuhan tercepat di dunia dan menjadi lokomotif untuk penerimaan devisa negara, pengembangan usaha, pembangunan infrastruktur, serta penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, untuk mendukung pengembangan pariwisata di Indonesia, maka diperlukan pembangunan infrastruktur yang memadai di setiap kawasan-kawasan pariwisata.

Akan tetapi, terdapat kendala yang dihadapi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu keterbatasan anggaran yang ada dibandingkan dengan jumlah kebutuhan untuk memenuhi target pembangunan, sehingga hanya diprioritaskan pada penanganan 3 KSPN sampai tahun 2019 yaitu KSPN Danau Toba dan sekitarnya, KSPN Mandalika, dan KSPN Borobudur dan sekitarnya.

2. Penilaian Anggaran Pembangunan Infrastruktur PUPR dalam Mendukung Kawasan Perbatasan

LAPORAN AKHIR

“Pengaruh Pembangunan Infrastruktur PUPR Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat”

Wilayah-wilayah perbatasan di Indonesia sesungguhnya memiliki arti yang sangat vital dan strategis, baik dalam sudut pandang pertahanan keamanan, maupun dalam sudut pandang ekonomi, sosial, dan budaya. Masing-masing wilayah perbatasan memiliki karakter sosial budaya dan ekonomi yang relatif berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun secara keseluruhan memperlihatkan adanya fenomena yang sama, yakni adanya interaksi langsung dan intensif antara warga negara Indonesia dengan warga negara tetangga, berupa hubungan-hubungan sosial kultural secara tradisional maupun kegiatan-kegiatan ekonomi modern.

Di wilayah perbatasan Indonesia, potensi sumberdaya alam dan yang berasal dari pintu-pintu masuk (border gates) di wilayah-wilayah tersebut sampai saat ini belum terkelola dengan baik sehingga cenderung belum memberikan kesejahteraan ekonomi yang memadai bagi masyarakat di wilayah-wilayah perbatasan. Sebagai contoh, wilayah perbatasan di Pulau Kalimantan telah mengalami eksploitasi sumberdaya alam yang tidak terkendali dan adanya kesenjangan kesejahteraan sosial dan ekonomi antara masyarakat di bagian Indonesia dan masyarakat di bagian Malaysia (Sabah dan Sarawak). Kondisi ini dikhawatirkan dapat memunculkan persoalan bilateral dan persoalan ketertiban dan keamanan dalam negeri yang mengarah pada terancamnya kedaulatan negara NKRI.

Indonesia saat ini menghadapi berbagai permasalahan di wilayah perbatasannya, yang sangat mempengaruhi kehidupan dan penghidupan warga negara Indonesia yang bermukim/bertempat tinggal di wilayah perbatasan. Dari berbagai permasalahan yang dihadapi, beberapa permasalahan pokok wilayah perbatasan yang perlu mendapat perhatian dan perlu segera ditangani dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- Kemiskinan akibat keterisolasian wilayah perbatasan menjadi pemicu pelintasbatas untuk memperbaiki perekonomiannya;
- Belum terkoordinasinya antar pelaku pengelolaan sumberdaya alam sehingga mengakibatkan eksploitasi sumberdaya alam kurang baik bagi pengembangan daerah maupun untuk masyarakat;
- Terbatasnya sarana dan prasarana perbatasan perhubungan seperti jalan dan jembatan di wilayah-wilayah perbatasan maupun ke arah perbatasan, yang menyebabkan kesenjangan antara kedua wilayah negara.

Sebagian besar daerah perbatasan di Indonesia masih merupakan daerah tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial, ekonomi serta pertahanan dan keamanan yang masih sangat terbatas. Ditinjau dari perspektif keamanan, kondisi daerah perbatasan wilayah Indonesia saat ini berada pada tahap mengkhawatirkan. Hal tersebut ditandai dengan

LAPORAN AKHIR

“Pengaruh Pembangunan Infrastruktur PUPR Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat”

timbulnya berbagai masalah perbatasan seperti penyelundupan barang, pencurian bahan bakar, dan pelintas batas ilegal. Daerah perbatasan darat merupakan daerah yang terpencil secara geografis dan sosial ekonomi sehingga masyarakat menjadi seolah-olah terpinggirkan. Kondisi ini menjadikan wilayah perbatasan darat memiliki potensi kerawanan aspek internal maupun eksternal. Dari aspek internal masyarakat perbatasan darat yang terpencil, miskin dan terpinggirkan akan memiliki kesadaran nasional (nasionalisme) yang rendah serta tidak dapat diandalkan sebagai pilar keamanan, yang akhirnya dapat membahayakan eksistensi negara. Dari aspek eksternal, wilayah perbatasan darat merupakan wilayah terbuka bagi pihak luar untuk masuk ke wilayah NKRI maupun bagi warga negara Indonesia untuk keluar, sehingga apabila wilayah perbatasan darat tidak diamankan dapat membahayakan kedaulatan NKRI.

Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara. Pengembangan PKSN dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga;
2. Pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga;
3. Pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya; dan/atau
4. Pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan di sekitarnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 pasal 13, pengembangan PKSN dimaksudkan untuk menyediakan pelayanan yang dibutuhkan untuk mengembangkan kegiatan masyarakat di perbatasan, termasuk pelayanan kegiatan lintas batas negara. Pengembangan PKSN dilakukan dalam kerangka sistem perkotaan nasional sehingga pusat perkotaan tersebut dapat dilekati fungsi pelayanan, baik sebagai PKN, PKW, maupun PKL.

Strategi operasionalisasi perwujudan pengembangan PKSN dilakukan dengan cara:

- Mengembangkan PKSN sebagai pusat kegiatan ekonomi, pintu gerbang internasional, serta simpul transportasi kawasan perbatasan negara;
- Mengembangkan PKSN sebagai pusat industri pengolahan yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu;

LAPORAN AKHIR
“Pengaruh Pembangunan Infrastruktur PUPR Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat”

- Mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan lanjutan yang berteknologi tinggi, padat modal, berdaya saing, dan ramah lingkungan dengan didukung pengelolaan limbah industri terpadu;
- Mengembangkan PKSNI berbasis mitigasi dan adaptasi;
- Mengembangkan fungsi PKSNI sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi;
- Mengembangkan pembangkit tenaga listrik yang melayani PKSNI;
- Mengembangkan prasarana telekomunikasi untuk melayani PKSNI; dan
- Mengembangkan prasarana sumber daya air baku.

PKSNI dikembangkan berdasarkan keunikan kondisi geografisnya (tipologi) yaitu berada langsung/dekat dengan garis batas negara di darat. Kondisi kawasan perbatasan negara yang dituju dengan adanya pengembangan PKSNI yaitu:

- a. Kawasan fungsi pertahanan dan keamanan negara untuk menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban wilayah negara;
- b. Pemertahanan fungsi kawasan lindung di kawasan perbatasan negara secara efektif;
- c. Percepatan pengembangan ekonomi kawasan perbatasan negara yang mandiri dan berdaya saing.

Tabel 8.2
Daftar Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSNI)
Mendukung Kawasan Perbatasan

NO.	PKSNI	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
1.	PKSNI Paloh – Aruk	Provinsi Kalimantan Barat	Kabupaten Sambas
2.	PKSNI Jagoi Babang	Provinsi Kalimantan Barat	Kabupaten Bengkayang
3.	PKSNI Entikong	Provinsi Kalimantan Barat	Kabupaten Sanggau
4.	PKSNI Nanga Badau	Provinsi Kalimantan Barat	Kabupaten Kapuas Hulu
5.	PKSNI Jasa	Provinsi Kalimantan Barat	Kabupaten Sintang
6.	PKSNI Long Pahangai	Provinsi Kalimantan Timur	Kabupaten Mahakam Ulu
7.	PKSNI Long Nawang	Provinsi Kalimantan Utara	Kabupaten Malinau
8.	PKSNI Long Midang	Provinsi Kalimantan Utara	Kabupaten Nunukan
9.	PKSNI Simanggaris	Provinsi Kalimantan Utara	Kabupaten Nunukan
10.	PKSNI Nunukan	Provinsi Kalimantan Utara	Kabupaten Nunukan
11.	PKN/PKSNI Tarakan	Provinsi Kalimantan Utara	Kota Tarakan
12.	PKSNI Kalabahi	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Alor
13.	PKSNI Atambua	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Belu
14.	PKSNI Kefamenanu	Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Timor Tengah Utara
15.	PKSNI Tahuna	Provinsi Sulawesi Utara	Kabupaten Kepulauan Sangihe

LAPORAN AKHIR
“Pengaruh Pembangunan Infrastruktur PUPR Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat”

NO.	PKSN	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
16.	PKSN Melonguane	Provinsi Sulawesi Utara	Kabupaten Kepulauan Talaud
17.	PKW/PKSN Kwandang	Provinsi Gorontalo	Kabupaten Gorontalo Utara
18.	PKW/PKSN Tolitoli	Provinsi Sulawesi Tengah	Kabupaten Toli Toli
19.	PKSN Dobo	Provinsi Maluku	Gugus Kepulauan Aru
20.	PKSN Saumlaki	Provinsi Maluku	Gugus Kepulauan Tanimbar
21.	PKSN Ilwaki	Provinsi Maluku	Gugus Kepulauan Terselatan
22.	PKSN Daruba	Provinsi Maluku Utara	Kabupaten Pulau Morotai
23.	PKN/PKSN Sorong	Provinsi Papua Barat	Kota Sorong
24.	PKW/PKSN Manokwari	Provinsi Papua Barat	Kabupaten Manokwari
25.	PKSN Jayapura	Provinsi Papua	Kabupaten Jayapura
26.	PKSN Tanah Merah	Provinsi Papua	Kabupaten Boven Digoel
27.	PKSN Merauke	Provinsi Papua	Kabupaten Merauke
28.	PKSN Sabang	Provinsi Daerah Istimewa Aceh	Kota Sabang
29.	PKSN Lhokseumawe	Provinsi Daerah Istimewa Aceh	Kota Lhokseumawe
30.	PKSN Medan	Provinsi Sumatera Utara	Kota Medan

Sumber:

- *Perpres 179 tahun 2014 - Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur;*
- *Perpres 31 tahun 2015 - Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan;*
- *Perpres 32 tahun 2015 - Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua;*
- *Perpres 33 tahun 2015 - Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku;*
- *Perpres 34 tahun 2015 - Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat;*
- *Perpres 11 Tahun 2017 - Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulut, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulteng, Provinsi Kaltim, dan Provinsi Kaltara; dan*
- *Perpres 49 Tahun 2018 - Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumut.*

Selain PKSN di kawasan perbatasan juga dibangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang merupakan pintu gerbang pemeriksaan yang strategis dalam rangka mendukung pemberian pelayanan kepada para pelintas batas antar negara. PLBN adalah tempat pemeriksaan dan pelayanan keluar masuk orang dan barang dari dan keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan paspor dan/atau pas lintas batas. Keberadaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Republik Indonesia dengan negara tetangga.

Dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 diatur tentang Percepatan Pembangunan Tujuh Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan sarana prasarana penunjang di kawasan perbatasan dan diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan

LAPORAN AKHIR
“Pengaruh Pembangunan Infrastruktur PUPR Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat”

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang diprioritaskan pembangunannya guna mendukung kawasan perbatasan (Tabel 8.3).

Tabel 8.3
Daftar Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Prioritas Nasional Mendukung Kawasan Perbatasan

NO.	PLBN	LOKASI
1.	Pembangunan PLBN & Sarana Penunjang Entikong	Provinsi Kalimantan Barat
2.	Pembangunan PLBN & Sarana Penunjang Nanga Badau	Provinsi Kalimantan Barat
3.	Pembangunan PLBN & Sarana Penunjang Aruk	Provinsi Kalimantan Barat
4.	Pembangunan PLBN & Sarana Penunjang Mota'ain	Provinsi Nusa Tenggara Timur
5.	Pembangunan PLBN & Sarana Penunjang Motamasin	Provinsi Nusa Tenggara Timur
6.	Pembangunan PLBN & Sarana Penunjang Wini	Provinsi Nusa Tenggara Timur
7.	Pembangunan PLBN & Sarana Penunjang Skouw	Provinsi Papua

Sumber: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Ketujuh PLBN tersebut sudah selesai terkonstruksi pada Tahap 1 yaitu:

1. PLBN Entikong diresmikan 21 Desember 2016 dan Tahap 2 dimulai Tahun 2017
2. PLBN Mota'ain diresmikan 28 Desember 2016
3. PLBN Badau diresmikan 16 Maret 2017;
4. PLBN Aruk diresmikan 17 Maret 2017;
5. PLBN Skouw diresmikan 9 Mei 201;
6. PLBN Motamasin 9 Januari 2018;
7. PLBN Wini 9 Januari 2018.

Selanjutnya Rencana Pembangunan PLBN Gelombang II (Pasca Inpres No. 6 Tahun 2015) yaitu:

A. Prioritas 1

1. PLBN Sei Pancang, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
2. PLBN Long Midang, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
3. PLBN Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;
4. PLBN Sota, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua

B. Prioritas 2

1. PLBN Long Nawang, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara

LAPORAN AKHIR
“Pengaruh Pembangunan Infrastruktur PUPR Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat”

2. PLBN Labang, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
3. PLBN Sei Kelik/Jasa, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;
4. PLBN Serasan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;
5. PLBN Napan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. PLBN Oepoli, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Penilaian Anggaran Pembangunan Infrastruktur PUPR dalam Mendukung Ketahanan Pangan

1) Jaringan Irigasi

Pertanian merupakan sektor penting dalam pembangunan perekonomian, mengingat fungsi dan perannya dalam penyediaan pangan bagi penduduk, pakan dan energi, serta tempat bergantungnya mata pencaharian penduduk di perdesaan. Sektor ini mempunyai sumbangan yang signifikan dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), peningkatan devisa dan peningkatan kesejahteraan petani, sehingga pembangunan pertanian dapat dikatakan sebagai motor penggerak dan penyangga perekonomian nasional. Infrastruktur dan sarana merupakan salah satu faktor penting dalam proses usaha tani, diantaranya infrastruktur irigasi. Infrastruktur irigasi sangat menentukan ketersediaan air dalam proses usahatani yang berdampak langsung terhadap kualitas dan kuantitas tanaman khususnya padi.

Pengelolaan air irigasi dari hulu (upstream) sampai dengan hilir (downstream) memerlukan sarana dan prasarana irigasi yang memadai. Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa: bendungan, bendung, saluran primer dan sekunder, box bagi, bangunan-bangunan ukur, dan saluran tersier serta saluran tingkat usaha tani (TUT). Rusaknya salah satu bangunan-bangunan irigasi akan mempengaruhi kinerja sistem yang ada, sehingga mengakibatkan efisiensi dan efektifitas irigasi menurun.

Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi. Sedangkan jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangannya. Daerah Irigasi (DI) terbagi menjadi dua jenis yaitu Daerah Irigasi (DI) Air Permukaan/Non Rawa dan Daerah Irigasi Rawa (DIR). Baik Daerah Irigasi Non Rawa maupun Rawa yang ada di Indonesia memerlukan dukungan pembangunan infrastruktur.

LAPORAN AKHIR

“Pengaruh Pembangunan Infrastruktur PUPR Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat”

2) Bendungan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Pasal 1 Tahun 2010 tentang Bendungan, bahwa bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (tailing), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk. Bendungan atau waduk merupakan wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan.

Menurut Peraturan Menteri Nomor 72/PRT/1997, bendungan adalah setiap bangunan penahan air buatan, jenis urukan atau jenis lainnya yang menampung air atau dapat menampung air, termasuk pondasi, bukit/tebing tumpuan, serta bangunan pelengkap dan peralatannya, termasuk juga bendungan limbah galian, tetapi tidak termasuk bendung dan tanggul.

Sebuah bendungan berfungsi sebagai penangkap air dan menyimpannya di musim hujan waktu air sungai mengalir dalam jumlah besar dan yang melebihi kebutuhan baik untuk keperluan, irigasi, air minum, industri atau yang lainnya. Dengan memiliki daya tampung tersebut sejumlah besar air sungai yang melebihi kebutuhan dapat disimpan dalam waduk dan baru dilepas mengalir ke dalam sungai lagi di hilirnya sesuai dengan kebutuhan pada saat diperlukan.

Bendungan secara umum merupakan tempat pada permukaan tanah yang digunakan untuk menampung air saat terjadi kelebihan air di musim penghujan sehingga air tersebut dapat dimanfaatkan saat musim kering. Sumber air bendungan pada umumnya berasal dari aliran air permukaan di tambah dari air hujan langsung. Pemanfaatan bendungan antara lain:

➤ Irigasi

Hujan yang turun di daerah tangkapan air sebagian besar akan mengalir ke sungai. Kelebihan air yang terdapat di bendungan merupakan sumber persediaan sehingga pada saat musim kemarau tiba air tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan salah satunya yaitu sebagai irigasi lahan pertanian.

➤ Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)

Bendungan yang berfungsi sebagai PLTA dikelola untuk mendapatkan kapasitas listrik yang dibutuhkan. PLTA bendungan merupakan sistem pembangkit listrik yang sistem pengoperasiannya terintegrasi dalam bendungan dengan memanfaatkan energi mekanis dari aliran air saat memutar turbin yang kemudian hasilnya akan diubah menjadi tenaga listrik oleh generator.

LAPORAN AKHIR
“Pengaruh Pembangunan Infrastruktur PUPR Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat”

➤ **Penyedia Air Baku**

Air baku atau air bersih yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air minum dan air rumah tangga. Bendungan selain sebagai sumber pengairan persawahan juga dimanfaatkan sebagai sumber penyediaan air baku untuk bahan baku air minum dan air rumah tangga. Air yang dipakai harus memenuhi persyaratan sesuai dengan kegunaannya.

Pengembangan bendungan di Indonesia selain dimanfaatkan untuk penyedia air baku, pengendali banjir juga dimanfaatkan sebagai sumber air bagi irigasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional terdapat beberapa Bendungan dan Daerah Irigasi yang diprioritaskan pembangunannya (Tabel 8.4 dan Tabel 8.5).

Tabel 8.4
Daftar Bendungan Prioritas Nasional Mendukung Ketahanan Pangan

NO.	BENDUNGAN	LOKASI
1.	Bendungan Marangkayu	Provinsi Kalimantan Timur
2.	Bendungan Kuningan	Provinsi Jawa Barat
3.	Bendungan Bendo	Provinsi Jawa Timur
4.	Bendungan Gongseng	Provinsi Jawa Timur
5.	Bendungan Tukul	Provinsi Jawa Timur
6.	Bendungan Gondang	Provinsi Jawa Tengah
7.	Bendungan Pidekso	Provinsi Jawa Tengah
8.	Bendungan Tugu	Provinsi Jawa Timur
9.	Bendungan Teritip	Provinsi Kalimantan Timur
10.	Bendungan Karalloe	Provinsi Sulawesi Selatan
11.	Bendungan Keureuto	Provinsi Daerah Istimewa Aceh
12.	Bendungan Muara Sei Gong	Provinsi Kepulauan Riau
13.	Bendungan Tapin	Provinsi Kalimantan Selatan
14.	Bendungan Passeloreng	Provinsi Sulawesi Selatan
15.	Bendungan Lolak	Provinsi Sulawesi Utara
16.	Bendungan Raknamo	Provinsi Nusa Tenggara Timur
17.	Bendungan Rotiklot	Provinsi Nusa Tenggara Timur
18.	Bendungan Bintang Bano	Provinsi Nusa Tenggara Barat
19.	Bendungan Mila	Provinsi Nusa Tenggara Barat
20.	Bendungan Tanju	Provinsi Nusa Tenggara Barat
21.	Bendungan Sindang Heula	Provinsi Banten
22.	Bendungan Logung	Provinsi Jawa Tengah
23.	Bendungan Karian	Provinsi Banten
24.	Bendungan Rukoh	Provinsi Daerah Istimewa Aceh
25.	Bendungan Way Sekampung	Provinsi Lampung
26.	Bendungan Kuwil Kawangkoan	Provinsi Sulawesi Utara
27.	Bendungan Ladongi	Provinsi Sulawesi Tenggara
28.	Bendungan Ciawi	Provinsi Jawa Barat
29.	Bendungan Sukamahi	Provinsi Jawa Barat
30.	Bendungan Leuwikeris	Provinsi Jawa Barat

LAPORAN AKHIR

"Pengaruh Pembangunan Infrastruktur PUPR Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat"

31.	Bendungan Cipanas	Provinsi Jawa Barat
32.	Bendungan Komering II	Provinsi Sumatera Selatan
33.	Bendungan Semantok	Provinsi Jawa Timur
34.	Bendungan Pamukkulu	Provinsi Sulawesi Selatan
35.	Bendungan Bener	Provinsi Jawa Tengah
36.	Bendungan Sadawarna	Provinsi Jawa Barat
37.	Bendungan Tiro	Provinsi Daerah Istimewa Aceh
38.	Bendungan Lausimeme	Provinsi Sumatera Utara
39.	Bendungan Kolhua	Provinsi Nusa Tenggara Timur
40.	Bendungan Sidan	Provinsi Bali
41.	Bendungan Telaga Waja	Provinsi Bali
42.	Bendungan Pelosika	Provinsi Sulawesi Tenggara
43.	Bendungan Jenelata	Provinsi Sulawesi Selatan
44.	Bendungan Matenggeng	Provinsi Jawa Barat
45.	Bendungan Marga III	Provinsi Lampung
46.	Bendungan Bagong	Provinsi Jawa Timur
47.	Bendungan Randugunting	Provinsi Jawa Tengah
48.	Bendungan Rokan Kiri	Provinsi Lampung
49.	Bendungan Mbay	Provinsi Nusa Tenggara Timur
50.	Bendungan Bolanghulu	Provinsi Gorontalo
51.	Bendungan Napungete	Provinsi Nusa Tenggara Timur
52.	Bendungan Temef	Provinsi Nusa Tenggara Timur
53.	Bendungan Way Apu	Provinsi Maluku
54.	Bendungan Meninting	Provinsi Nusa Tenggara Barat

Sumber: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Tabel 8.5

Daftar Daerah Irigasi D.I. Prioritas Nasional Mendukung Ketahanan Pangan

NO.	D.I.	LOKASI
1.	Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Lhok Guci	Provinsi Daerah Istimewa Aceh
2.	Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Jambo Aye Kanan	Provinsi Daerah Istimewa Aceh
3.	Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Lematang	Provinsi Sulawesi Selatan
4.	Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Umpu Sistem (Way Besai)	Provinsi Lampung
5.	Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Leuwigoong, Garut	Provinsi Jawa Barat
6.	Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Baliase	Provinsi Sulawesi Selatan
7.	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Gumbasa	Provinsi Sulawesi Tengah

Sumber: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

4. Penilaian Anggaran Pembangunan Infrastruktur PUPR dalam Mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus perlu dilakukan untuk mempercepat

LAPORAN AKHIR
“Pengaruh Pembangunan Infrastruktur PUPR Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat”

pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah dalam kesatuan ekonomi nasional. Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disebut KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.

Di Indonesia sampai dengan Tahun 2017 terdapat sepuluh Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang diprioritaskan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Tabel 8.6).

Tabel 8.6
Daftar kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Prioritas Nasional

NO.	KEK	LOKASI
1.	KEK Sei Mangkei	Provinsi Sumatera Utara
2.	KEK Tanjung Api Api	Provinsi Sumatera Selatan
3.	KEK Tanjung Lesung	Provinsi Banten
4.	KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan	Provinsi Kalimantan Timur
5.	KEK Palu	Provinsi Sulawesi Tengah
6.	KEK Bitung	Provinsi Sulawesi Utara
7.	KEK Mandalika	Provinsi Nusa Tenggara Barat
8.	KEK Morotai	Provinsi Maluku Utara
9.	KEK Belitung (Tanjung Kelayang)	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
10.	KEK Sorong	Provinsi Papua Barat
11.	KEK Lhokseumawe (Arun)	Provinsi Daerah Istimewa Aceh
12.	KEK Merauke	Provinsi Papua

Sumber: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Catatan: KEK Merauke dihapuskan dalam daftar Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Tahun 2018

Dalam Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri, pasal 2 menyatakan bahwa pembangunan kawasan industri (industrial estate) bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan industri di daerah, memberikan kemudahan bagi kegiatan

LAPORAN AKHIR
“Pengaruh Pembangunan Infrastruktur PUPR Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat”

industri, mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di kawasan industri, dan meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan.

Tujuan utama pembangunan dan pengusahaan kawasan industri (industrial estate) adalah untuk memberikan kemudahan bagi para investor sektor industri untuk memperoleh lahan industri dalam melakukan pembangunan industri. Pembangunan kawasan industri dimaksudkan sebagai sarana upaya pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik, melalui penyediaan lokasi industri yang telah siap pakai yang didukung oleh fasilitas dan prasarana yang lengkap dan berorientasi pada kemudahan untuk mengatasi masalah pengelolaan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh limbah industri.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Tujuan penyelenggaraan perindustrian dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014:

- Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
- Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
- Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
- Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Sampai dengan Tahun 2017 terdapat sepuluh Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang diprioritaskan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Tabel 8.7).

Tabel 8.7
Daftar Kawasan Industri (KI) Prioritas Nasional

NO.	Kawasan Industri	LOKASI
1.	KI Kuala Tanjung	Provinsi Sumatera Utara
2.	KI Landak	Provinsi Kalimantan Barat

LAPORAN AKHIR
“Pengaruh Pembangunan Infrastruktur PUPR Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat”

NO.	Kawasan Industri	LOKASI
3.	KI Ketapang	Provinsi Kalimantan Barat
4.	KI Tanggamus	Provinsi Lampung
5.	KI Batulicin	Provinsi Kalimantan Selatan
6.	KI Jorong	Provinsi Sulawesi Selatan
7.	KI Bantaeng	Provinsi Nusa Tenggara Barat
8.	KI Morowali	Provinsi Sulawesi Tengah
9.	KI Konawe	Provinsi Sulawesi Tenggara
10.	KI Buli, Halmahera Timur	Provinsi Maluku Utara
11.	KI Teluk Bintuni	Provinsi Papua Barat
12.	KI Kendal	Provinsi Jawa Tengah
13.	KI Java Integrated Industrial Port Estate (JIPE), Gresik	Provinsi Jawa Timur
14.	KI Dumai	Provinsi Riau
15.	KI Tanjung Buton	Provinsi Riau
16.	KI Tanah Kuning	Provinsi Kalimantan Utara
17.	KI Wilmar, Serang	Provinsi Banten

Sumber: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

5. Penilaian Anggaran Pembangunan Infrastruktur PUPR dalam Mendukung Kawasan Perdesaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahap ke-2 mengarahkan pembangunan pertanian yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional melalui kontribusinya dalam pembentukan modal, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bio-energi, penyerap tenaga kerja, sumber devisa negara dan sumber pendapatan masyarakat, serta berperan dalam pelestarian lingkungan melalui praktik budidaya pertanian yang ramah lingkungan.

Selama ini dikenal istilah sentra pertanian sebagai bagian dari kawasan yang memiliki ciri tertentu yang di dalamnya terdapat kegiatan produksi suatu jenis produk pertanian unggulan. Selanjutnya, guna mendukung tercapainya Empat Target Sukses Kementerian Pertanian, yaitu:

- (1) Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan;
- (2) Peningkatan diversifikasi pangan;
- (3) Peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor; serta
- (4) Peningkatan kesejahteraan petani, pendekatan sentra pertanian dikembangkan menjadi pendekatan kawasan pertanian.

LAPORAN AKHIR
“Pengaruh Pembangunan Infrastruktur PUPR Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat”

Pendekatan pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) merupakan gabungan dari sentra-sentra pertanian yang terkait secara fungsional, baik dari sisi faktor sumber daya alam, sosial budaya, maupun infrastruktur, sehingga memenuhi batasan luas minimal skala efektivitas manajemen pembangunan wilayah. Pendekatan pengembangan kawasan merupakan salah satu upaya optimalisasi perencanaan pembangunan pertanian, serta dirancang untuk meningkatkan efektivitas kegiatan dan efisiensi anggaran, serta mendorong keberlanjutan kawasan komoditas unggulan. Melalui pendekatan ini diharapkan berbagai program dan kegiatan pertanian dapat dipadukan menjadi suatu kesatuan yang utuh, baik dari perspektif sistem maupun kewilayahan, sehingga dapat mendorong tercapainya peningkatan daya saing komoditas, wilayah, serta kesejahteraan petani sebagai pelaku usahatani. Pada Tabel 8.8 terdapat beberapa Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) di Indonesia yang akan dikembangkan dan diperlukan dukungan infrastruktur.

LAPORAN AKHIR
“Pengaruh Pembangunan Infrastruktur PUPR Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat”

Tabel 8.8
Daftar Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)

NO.	KPPN	LOKASI			PENYUSUNAN MASTERPLAN	
		KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	TAHUN	KEWENANGAN
1.	KPPN Poso	- Pamona Puselemba	Kabupaten Poso	Provinsi Sulawesi Tengah	2016	Kemendes PDTT
2.	KPPN Bula	- Seram Utara Timur Kobi - Seram Utara Timur Seti - Seram Utara Barat	Kabupaten Maluku Tengah	Provinsi Maluku	2016	Kemendes PDTT
		- Teluk Waru	Kabupaten Seram Bagian Timur	Provinsi Maluku	2016	Kemendes PDTT
3.	KPPN Merauke	- Kimaam - Tabonji - Liwayab - Waan	Kabupaten Merauke	Provinsi Papua	2016	Kemendes PDTT
4.	KPPN Tanjung Siapi	- Tanjung Lago	Kabupaten Banyuasin	Provinsi Sumatera Selatan	2016	Kemendes PDTT
5.	KPPN Pinrang	- Suppa	Kabupaten Pinrang	Provinsi Sulawsi Selatan	2016	Kemendes PDTT
6.	KPPN Banyuwangi	- Licin - Glagah - Kalipuro	Kabupaten Banyuwangi	Provinsi Jawa Timur	2016	Kemendes PDTT
7.	KPPN Maba	- Maba	Kabupaten Halmahera Timur	Provinsi Maluku Utara	2016	Kemendes PDTT
8.	KPPN Rasau Jaya	- Rasau Jaya - Sungai Raya	Kabupaten Kubu Raya	Provinsi Kalimantan Barat	2016	Kemendes PDTT
9.	KPPN Misool	- Misool Utara - Misool Selatan	Kabupaten Raja Ampat	Provinsi Papua Barat	2016	Kementerian ATR
10.	KPPN Daruba	- Morotai Selatan	Kabupaten Pulau Morotai	Provinsi Maluku Utara	2016	Kementerian PUPR
11.	KPPN Praya	- Keruak - Jerowaru	Kabupaten Lombok Timur	Provinsi Nusa Tenggara Barat	2016	Kementerian PUPR
12.	KPPN Tabanan	- Kerambitan - Selemadeg Timur - Selemadeg Barat - Selemadeg - Pupuan	Kabupaten Tabanan	Provinsi Bali	2016	Kementerian PUPR
13.	KPPN Labuan Bajo	- Komodo	Kabupaten Manggarai Barat	Provinsi Nusa Tenggara Timur	2016	Kementerian PUPR

LAPORAN AKHIR

“Pengaruh Pembangunan Infrastruktur PUPR Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat”

NO.	KPPN	LOKASI			PENYUSUNAN MASTERPLAN	
		KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	TAHUN	KEWENANGAN
14.	KPPN Tanjung Pandan	- Manggar	Kabupaten Belitung Timur	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2016	Kemendes PDTT
15.	KPPN Mesuji	- Rawa Pitu - Rawa Jitu Timur - Rawa Jitu Selatan	Kabupaten Tulang Bawang	Provinsi Lampung	2016	Kemendes PDTT
16.	KPPN Barru	- Barru - Balusu	Kabupaten Barru	Provinsi Sulawesi Selatan	2016	Kemendes PDTT
17.	KPPN Baturaja	- Belitang	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	Provinsi Sumatera Selatan	2016	Kemendes PDTT
18.	KPPN Marabahan	- Anjir Pasar	Kabupaten Barito Kuala	Provinsi Kalimantan Selatan	2016	Kemendes PDTT
19.	KPPN Mamuju	- Topoyo - Karossa	Kabupaten Mamuju Tengah	Provinsi Sulawesi Barat	2016	Kemendes PDTT
20.	KPPN Peureulak	- Idi Rayeuk - Darul Aman - Idi Timur - Peudawa - Peureulak Barat - Peureulak	Kabupaten Aceh Timur	Provinsi Daerah Istimewa Aceh	2017	Kemendes PDTT
21.	KPPN Tapan	- XI Koto Tarusan	Kabupaten Pesisir Selatan	Provinsi Sumatera Barat	2017	Kemendes PDTT
22.	KPPN Sukadana	- Simpang Hilir - Teluk Batang	Kabupaten Kayong Utara	Provinsi Kalimantan Barat	2017	Kemendes PDTT
23.	KPPN Cibaliung	- Labuan - Jiput	Kabupaten Pandeglang	Provinsi Banten	2017	Kemendes PDTT
24.	KPPN Buol	- Tiloan	Kabupaten Buol	Provinsi Sulawesi Tengah	2017	Kemendes PDTT
25.	KPPN Tabanan	- Kerambitan - Selemadeg Timur - Selemadeg Barat - Selemadeg - Pupuan	Kabupaten Tabanan	Provinsi Bali	2016	Kementerian PUPR
26.	KPPN Labuan Bajo	- Komodo	Kabupaten Manggarai Barat	Provinsi Nusa Tenggara Timur	2016	Kementerian PUPR
27.	KPPN Tanjung Pandan	- Manggar	Kabupaten Belitung Timur	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2016	Kemendes PDTT

LAPORAN AKHIR

“Pengaruh Pembangunan Infrastruktur PUPR Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat”

NO.	KPPN	LOKASI			PENYUSUNAN MASTERPLAN	
		KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	TAHUN	KEWENANGAN
28.	KPPN Mesuji	- Rawa Pitu - Rawa Jitu Timur - Rawa Jitu Selatan	Kabupaten Tulang Bawang	Provinsi Lampung	2016	Kemendes PDTT
29.	KPPN Barru	- Barru - Balusu	Kabupaten Barru	Provinsi Sulawesi Selatan	2016	Kemendes PDTT
30.	KPPN Baturaja	- Belitang	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	Provinsi Sumatera Selatan	2016	Kemendes PDTT
31.	KPPN Marabahan	- Anjir Pasar	Kabupaten Barito Kuala	Provinsi Kalimantan Selatan	2016	Kemendes PDTT
32.	KPPN Mamuju	- Topoyo - Karossa	Kabupaten Mamuju Tengah	Provinsi Sulawesi Barat	2016	Kemendes PDTT
33.	KPPN Peureulak	- Idi Rayeuk - Darul Aman - Idi Timur - Peudawa - Peureulak Barat - Peureulak	Kabupaten Aceh Timur	Provinsi Daerah Istimewa Aceh	2017	Kemendes PDTT
34.	KPPN Tapan	- XI Koto Tarusan	Kabupaten Pesisir Selatan	Provinsi Sumatera Barat	2017	Kemendes PDTT
35.	KPPN Sukadana	- Simpang Hilir - Teluk Batang	Kabupaten Kayong Utara	Provinsi Kalimantan Barat	2017	Kemendes PDTT
36.	KPPN Cibaliung	- Labuan - Jiput	Kabupaten Pandeglang	Provinsi Banten	2017	Kemendes PDTT
37.	KPPN Buol	- Tiloan	Kabupaten Buol	Provinsi Sulawesi Tengah	2017	Kemendes PDTT
38.	KPPN Manokwari	- Sidey	Kabupaten Manokwari	Provinsi Papua Barat	2017	Kemendes PDTT
39.	KPPN Arso	- Muara Tami	Kabupaten Jayapura	Provinsi Papua	2017	Kemendes PDTT
40.	KPPN Sangatta	- Sangatta Selatan - Teluk Panda	Kabupaten Kutai Timur	Provinsi Kalimantan Timur	2017	Kemendes PDTT
41.	KPPN Raha	- Kontunaga	Kabupaten Muna	Provinsi Sulawesi Tenggara	2017	Kemendes PDTT
41.	KPPN Mamuju	- Kaluku - Mamuju	Kabupaten Mamuju	Provinsi Sulawesi Barat	2017	Kemendes PDTT
42.	KPPN Sadaniang	- Sadaniang	Kabupaten Mempawah	Provinsi Kalimantan Barat	2017	Kementerian PUPR
43.	KPPN Baturaja	- Sikap Dalam	Kabupaten Empat Lawang	Provinsi Sumatera Selatan	2017	Kementerian PUPR

LAPORAN AKHIR

“Pengaruh Pembangunan Infrastruktur PUPR Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat”

NO.	KPPN	LOKASI			PENYUSUNAN MASTERPLAN	
		KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	TAHUN	KEWENANGAN
44.	KPPN Marabahan	- Martapura - Martapura Barat	Kabupaten Banjar	Provinsi Kalimantan Selatan	2017	Kementerian PUPR
45.	KPPN Barru	- Maritengngae	Kabupaten Sidenreng Rappang	Provinsi Sulawesi Selatan	2017	Kementerian PUPR
46.	KPPN Kolonedale	- Towuti	Kabupaten Luwu Timur	Provinsi Sulawesi Selatan	2017	Kementerian PUPR
		- Bungku Selatan	Kabupaten Morowali	Provinsi Sulawesi Tengah	2017	Kementerian PUPR
47.	KPPN Sidikalang	- Kerajaan - Pergetteng-getteng - Sungkut - Siempat Rube - Tinada	Kabupaten Pakpak Barat	Provinsi Sumatera Utara	2017	Kementerian PUPR
		- Ajibata	Toba Samosir	Provinsi Sumatera Utara	2017	Kementerian PUPR
48.	KPPN Raba	- Manggalewa - Kilo	Kabupaten Dompur	Provinsi Nusa Tenggara Barat	2017	Kementerian PUPR
49.	KPPN Tanjung Redeb	- Pulau Derawan	Kabupaten Berau	Provinsi Kalimantan Timur	2017	Kementerian PUPR
50.	KPPN Tanjung Pandan	- Pulau Besar	Kabupaten Bangka Selatan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2018	Kemendes PDTT
		- Tanjung Pandan	Kabupaten Belitung	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2018	Kementerian ATR
51.	KPPN Kwandang	- Wonosari	Kabupaten Boalemo	Provinsi Gorontalo	2018	Kementerian PUPR
		-	Kabupaten Gorontalo	Provinsi Gorontalo	2018	Kementerian ATR
		- Anggrek - Kwandang	Kabupaten Gorontalo Utara	Provinsi Gorontalo	2018	Kemendes PDTT
52.	KPPN Pamekasan	- Larangan - Pamekasan	Kabupaten Pamekasan	Provinsi Jawa Timur	2018	Kementerian ATR
		- Sampang	Kabupaten Sampang	Provinsi Jawa Timur	2018	Kemendes PDTT
53.	KPPN Sambas	- Jawai - Jawai Selatan - Sambas	Kabupaten Sambas	Provinsi Kalimantan Barat	2018	Kemendes PDTT
		- Ledo	Kabupaten Bengkayang	Provinsi Kalimantan Barat	2018	Kementerian PUPR

LAPORAN AKHIR

“Pengaruh Pembangunan Infrastruktur PUPR Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat”

NO.	KPPN	LOKASI			PENYUSUNAN MASTERPLAN	
		KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	TAHUN	KEWENANGAN
54.	KPPN Wangi-wangi	- Wangi-wangi Selatang	Kabupaten Wakatobi	Provinsi Sulawesi Tenggara	2018	Kemendes PDTT
		- Argo Makmur - Padang Jaya -	Kabupaten Bengkulu Utara	Provinsi Bengkulu	2018	Kemendes PDTT
55.	KPPN Mesuji	- Mesuji - Mesuji Timur	Kabupaten Mesuji	Provinsi Lampung	2018	Kemendes PDTT
56.	KPPN Sumabawa Besar	- Moyo Hilir - Moyo Utara -	Kabupaten Sumbawa	Provinsi Nusa Tenggara Barat	2018	Kemendes PDTT
57.	KPPN Ende	- Ende - Kelimutu	Kabupaten Ende	Provinsi Nusa Tenggara Timur	2018	Kemendes PDTT
58.	KPPN Pangkalan Bun	-	Kabupaten Kotawaringin Barat	Provinsi Kalimantan Tengah	2018	Kemendes PDTT
59.	KPPN Praya	- Praya Barat	Kabupaten Lombok Tengah	Provinsi Nusa Tenggara Barat	2018	Kementerian PUPR
60.	KPPN Raha	-	Kabupaten Muna Barat	Provinsi Sulawesi Tenggara	2018	Kementerian PUPR
61.	KPPN Kolonedale	-	Kabupaten Konawe Selatan	Provinsi Sulawesi Tenggara	2018	Kementerian PUPR
62.	KPPN Ende	- Soe	Kabupaten Ngada	Provinsi Nusa Tenggara Timur	2018	Kementerian PUPR
63.	KPPN Tuau		Kabupaten Parigi Moutong	Provinsi Sulawesi Tengah	2019	Kementerian ATR

LAPORAN AKHIR
"Pengaruh Pembangunan Infrastruktur PUPR Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat"

Tim Penyusun Laporan

Ismanto (PT. Padmaduta)

Rudi Hardono (PT. Padmaduta)

RIntakasari Vita Ayuningtyas (ITB)

Anugerah Karta Monika (STIS)